



PERAN ASEAN STRATEGIC PLAN FOR CULTURE AND ARTS DALAM MENDORONG IDENTITAS REGIONAL ASIA TENGGARA

Dede Rohman¹, Praycillia Jovanka Bandau^{2*}

Universitas Fajar^{1,2}

Abstrack

The ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts (ASPCA) 2016–2025 was initiated to address the relatively low level of socio-cultural cohesion in Southeast Asia compared to its political and economic integration, as well as the pressures of globalization that threaten local cultural values. This article aims to analyze the role of ASPCA as a cultural soft power instrument in fostering regional identity and strengthening socio-cultural integration within ASEAN. The study is grounded in the theoretical framework of soft power and new regionalism, which emphasizes the construction of regional identity through social interaction, cultural exchange, and the involvement of state and non-state actors. Using a qualitative descriptive approach, this research employs document analysis of official ASEAN policy documents, academic literature, and reports from relevant international organizations. The findings show that ASPCA contributes to the formation of a shared regional identity by promoting cross-border cultural collaboration, strengthening awareness of cultural heritage, facilitating intercultural dialogue, and integrating ASEAN values into educational and community-based programs. However, the implementation of ASPCA still faces challenges, including disparities in institutional capacity, political priorities, and resource availability among member states. Overall, this study argues that ASPCA places culture as a substantive pillar of ASEAN integration, complementing political and economic dimensions, and highlights the strategic role of culture in advancing ASEAN's legitimacy and cohesion in the global arena.

Keywords: ASEAN, Socio-Cultural Integration, Soft Power, Regional Identity

Abstrak

ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts (ASPCA) 2016–2025 disusun untuk merespons rendahnya tingkat kohesi sosial-budaya di Asia Tenggara dibandingkan dengan integrasi politik dan ekonomi, serta tekanan globalisasi yang mengancam nilai-nilai budaya lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ASPCA

*Corresponding Author: Praycillia Jovanka Bandau, Universitas Fajar, Indonesia

251

sebagai instrumen soft power budaya dalam mendorong pembentukan identitas regional dan memperkuat integrasi sosial-budaya ASEAN. Tulisan ini berpijak pada kerangka teoritis soft power dan new regionalism, yang menekankan pembentukan identitas kawasan melalui interaksi sosial, pertukaran budaya, serta keterlibatan aktor negara dan non-negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen terhadap kebijakan resmi ASEAN, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional terkait. Hasil tulisan menunjukkan bahwa ASPCA berkontribusi dalam membangun identitas regional bersama melalui kolaborasi budaya lintas negara, peningkatan kesadaran terhadap warisan budaya, fasilitasi dialog antarbudaya, serta integrasi nilai-nilai ASEAN dalam pendidikan dan program berbasis komunitas. Namun demikian, implementasi ASPCA masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas institusional, perbedaan prioritas politik, dan keterbatasan sumber daya antar negara anggota. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa ASPCA menempatkan budaya sebagai pilar substantif dalam integrasi ASEAN, yang melengkapi dimensi politik dan ekonomi.

Kata Kunci: ASEAN, Integrasi Sosial-Budaya, Soft Power, Identitas Regional

Pendahuluan

Dalam konteks meningkatnya interdependensi global, kerja sama regional menjadi instrumen penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, dan merespons tantangan global secara kolektif (Acharya, 2021; Wunderlich, 2012). Di Asia Tenggara, ASEAN hadir sebagai organisasi regional yang dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota melalui pendekatan konsensus, non-intervensi, dan solidaritas kawasan, yang kemudian berkembang tidak hanya pada isu politik dan keamanan, tetapi juga mengembangkan kerangka integrasi yang lebih luas melalui *ASEAN Community* dengan tiga pilar utamanya: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya (ASEAN, 2016). Kerangka ini menegaskan komitmen ASEAN untuk membangun integrasi regional yang komprehensif sebagai respons terhadap dinamika global dan regional yang semakin kompleks (Nadalutti & Rüländ, 2024).

Di tengah arus globalisasi dan persaingan *soft power* yang kian dinamis (X. Ma, 2024; Nye Jr., 2004), budaya menjadi jantung dari identitas kolektif dan integrasi kawasan, terlebih mengingat Asia Tenggara memiliki keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang signifikan sebagai kekayaan sekaligus tantangan (Acharya, 2021; Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Oleh karena itu, tanpa narasi budaya yang inklusif, integrasi kawasan berisiko terfragmentasi oleh dinamika politik-ekonomi dan pengaruh kekuatan global (ASEAN, 2016; Humairoh, 2025).

Meskipun ASEAN menunjukkan kemajuan signifikan dalam kerja sama politik-keamanan dan integrasi ekonomi kawasan, dimensi sosial-budaya dan pembentukan identitas regional masih menghadapi berbagai keterbatasan. Integrasi ekonomi, seperti liberalisasi perdagangan dan pembentukan pasar regional, berkembang relatif lebih cepat dibandingkan upaya membangun rasa kebersamaan dan identitas kolektif di antara masyarakat Asia Tenggara (Acharya, 2021). Sejumlah kajian menyoroti bahwa kerja sama ASEAN masih didominasi oleh pendekatan negara-sentris dan kepentingan nasional, sehingga aspek identitas dan kohesi sosial belum sepenuhnya menjadi prioritas utama integrasi kawasan (Concepcion, 2022; Wunderlich, 2012). Akibatnya, identitas regional ASEAN belum terinternalisasi secara kuat di tingkat masyarakat, meskipun secara institusional ASEAN telah berkembang sebagai organisasi regional yang mapan (Wang, 2024).

Urgensi penguatan kerja sama sosial-budaya ASEAN semakin mengemuka seiring dengan derasnya arus globalisasi yang membawa penetrasi budaya populer asing, komersialisasi budaya, serta transformasi sosial yang cepat di kawasan Asia Tenggara. Dinamika ini berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal dan melemahkan kohesi sosial masyarakat, terutama di negara-negara dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi (Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Selain itu, munculnya sengketa dan klaim sepihak atas warisan budaya antarnegara anggota

memperlihatkan rapuhnya narasi identitas kolektif ASEAN, sekaligus menegaskan keterbatasan pendekatan nasional dalam mengelola isu-isu budaya lintas batas (ASEAN, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa kerangka kerja sama budaya yang strategis dan terkoordinasi di tingkat kawasan, integrasi sosial-budaya ASEAN berisiko bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan (Chandra, 2020; Humairoh, 2025).

ASEAN menyadari pentingnya budaya sebagai pilar strategis yang sejajar dengan politik dan ekonomi sehingga melahirkan *ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts (ASPCA)* 2016-2025 untuk memperkuat identitas regional, pelestarian budaya, dialog antarbudaya, dan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat identitas regional melalui pelestarian budaya, dialog antarbudaya, promosi nilai bersama dan dukungan pada pembangunan yang berkelanjutan (ASEAN, 2016; Sundram, 2025).

ASPCA adalah kerangka strategis untuk memperkuat integrasi budaya di Asia Tenggara, dengan tujuan membangun kesadaran akan identitas regional dan memfasilitasi interaksi antarbudaya melalui keterlibatan *multi-stakeholder*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah, seni, dan nilai-nilai bersama, serta melestarikan warisan budaya dan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dokumen ini disusun untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman, mengantisipasi konflik kultural, dan memperkuat posisi ASEAN dalam diplomasi budaya global. Dengan pendekatan holistik, strategi ini tidak hanya fokus pada preservasi budaya, tetapi juga sebagai instrumen pemersatu dan penggerak pembangunan berkelanjutan, serta merespons kesenjangan keterlibatan masyarakat dan memperkuat kapabilitas institusional negara anggota dalam pengelolaan budaya lintas batas (ASEAN, 2016).

Sebelum adanya ASPCA, integrasi sosial-budaya belum memperoleh perhatian yang setara dengan dua pilar seperti politik-keamanan dan ekonomi. Implementasi ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) 2009-2015 lebih banyak menekankan kegiatan solidaritas sosial seperti pertukaran budaya dan kerja sama pendidikan. Meski bermanfaat, pendekatan ini belum secara langsung membentuk identitas kolektif ASEAN yang kuat (Conception, 2025). Keterbatasan tersebut berkaitan dengan karakter kerja sama sosial-budaya ASEAN yang lebih menekankan aktivitas simbolik dan pertukaran formal, sehingga belum sepenuhnya menyentuh proses internalisasi identitas di tingkat masyarakat. Di sisi lain, kuatnya orientasi negara dan prinsip non-intervensi dalam ASEAN membatasi upaya pengembangan narasi identitas regional yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan (Acharya, 2021; Wang, 2024).

Pentingnya membangun kohesi sosial dan kesadaran multikultural di kawasan sejalan dengan temuan bahwa pendidikan kewargaan dan kurikulum multikultural berperan strategis dalam menumbuhkan toleransi, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat identitas kolektif di masyarakat majemuk (Banks, 2014; UNESCO, 2015; Verkuyten et al., 2019). Dalam konteks Asia Tenggara, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pembentukan identitas nasional, tetapi juga pada pengenalan nilai-nilai kebersamaan kawasan, toleransi lintas budaya, dan penghargaan terhadap keberagaman regional, sebagaimana ditekankan dalam kajian pendidikan multikultural dan kewargaan global (Banks, 2014; UNESCO, 2015). Sementara itu, kurikulum multikultural merujuk pada integrasi perspektif lintas budaya dan regional dalam pendidikan formal, khususnya di negara-negara anggota ASEAN, sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran identitas kolektif di tengah

masyarakat yang multietnis dan multikultural (Verkuyten et al., 2019).

Kehadiran ASPCA menyoroti kemajuan ASEAN di bidang kebudayaan sebagai komponen krusial dalam membina persatuan regional. Sebelumnya, hal ini dipandang sebagai alat diplomasi regional, tetapi kini dipandang sebagai alat integratif yang mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi. Perencanaan strategis ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk memahami dinamika sosial yang kompleks di dunia global, yang menjadikan konteks historis dan tulisan sebelumnya krusial. Sebelum rencana ini, integrasi sosial-ekonomi di Asia Tenggara tidak sepenting sekarang jika dibandingkan dengan aspek politik dan ekonomi (ASEAN, 2016). Di sisi lain, ASCC lebih berfokus pada pembinaan kohesi dan solidaritas sosial tanpa menggunakan perang strategis (ASEAN, 2009).

Inisiatif budaya kawasan seperti ASCC *Blueprint* 2009-2015 lebih mengarah pada solidaritas sosial ketimbang kerangka strategis budaya (ASEAN, 2009). Namun gelombang globalisasi mengenai komersialisasi budaya, urbanisasi, dan pengaruh budaya populer asing telah mengikis identitas lokal secara nyata (Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Sengketa warisan budaya seperti antara Indonesia, Malaysia dan Thailand semakin mempertegas kebutuhan pengelolaan budaya kolektif yang mampu menjaga harmoni sekaligus menghormati keunikan nasional (ASEAN, 2023).

Tingkat kohesi sosial-budaya di Asia Tenggara relatif lebih rendah dibandingkan integrasi politik dan ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh arus globalisasi yang memiliki potensi mengikis nilai-nilai budaya lokal. Arus globalisasi tersebut bekerja melalui dominasi budaya populer global, komodifikasi budaya, serta penetrasi media dan teknologi digital yang mendorong homogenisasi nilai dan gaya hidup,

sehingga praktik budaya lokal semakin terpinggirkan, khususnya di kalangan generasi muda (Chandra, 2020; Humairoh, 2025; Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Kajian mengenai regionalisme budaya menegaskan bahwa dimensi sosial-budaya memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas kolektif ASEAN, terutama melalui diplomasi budaya dan penguatan kohesi sosial (Chandra, 2020).

Sebagai perbandingan, literatur regionalisme menyebut bahwa Uni Eropa membangun identitas kawasan melalui instrumen hukum dan simbol formal yang bersifat mengikat, sedangkan ASEAN cenderung menekankan jalur informal berbasis budaya populer dan norma sosial. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan perbedaan nilai dan norma integrasi regional yang mendasari kedua kawasan. Uni Eropa berkembang melalui tradisi integrasi supranasional yang menekankan supremasi hukum, harmonisasi kebijakan, dan pembentukan identitas politik bersama yang mengikat, sementara ASEAN berakar pada norma konsensus, non-intervensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan, sehingga pembentukan identitas kawasan lebih banyak ditempuh melalui interaksi sosial, budaya, dan praktik informal di tingkat masyarakat (Conception, 2025; Wunderlich, 2012).

Studi terbaru juga menyoroti bahwa meskipun ASEAN belum memiliki institusi sekuat Uni Eropa dalam integrasi budaya, dinamika identitas kawasan terus berkembang melalui diplomasi budaya, pertukaran lintas negara, dan partisipasi masyarakat sipil (Nadalutti & Rüland, 2024). Kondisi inilah yang kemudian mendorong ASEAN untuk merumuskan *ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts (ASPCA)* 2016-2025 sebagai upaya memperkuat integrasi sosial-budaya kawasan. ASPCA menghadirkan perspektif baru seperti menghimpun pelestarian budaya, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan budaya sebagai motor pembangunan inklusif.

Strategi ini tidak hanya simbolis, tetapi konkret yang melalui event lintas negara dan diplomasi masyarakat yang menciptakan solidaritas kawasan (Conception, 2025). Dari sudut pandang teori *soft power* (Nye Jr., 2004) dan integrasi regional, kerja sama budaya berpotensi menjadi katalisator bagi kohesi sosial dan legitimasi politik ASEAN di mata dunia (Wang, 2024).

Sebelum dirumuskannya strategi budaya regional yang komprehensif, Asia Tenggara menghadapi tantangan sosial-budaya yang kompleks akibat globalisasi, komersialisasi budaya, urbanisasi, dan penetrasi budaya populer asing, yang mengancam identitas budaya lokal. Gesekan antarbudaya dan klaim sepihak terhadap warisan budaya, seperti sengketa negara anggota, memperjelas rapuhnya narasi kolektif ASEAN sebagai komunitas budaya. Tanpa kerangka strategis yang menyatukan keberagaman, integrasi sosial-budaya di kawasan hanya akan bersifat simbolik. Kelemahan dalam kesadaran kolektif mengenai identitas regional menjadi tantangan tersendiri, di mana ASEAN masih berjuang untuk membangun rasa kebersamaan di tengah keberagaman etnis, bahasa, dan agama. Budaya dianggap sebagai alat strategis untuk menjembatani perbedaan dan memperkuat ikatan sosial antar negara anggota, dengan tujuan menciptakan rasa memiliki dan memperdalam "*ASEAN Mindset*" untuk integrasi jangka panjang (ASEAN, 2016).

Sejak disetujuinya ASPCA, negara-negara anggota mulai mengimplementasikan inisiatif yang mendukung tujuan strategis program, seperti program ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) di Filipina dan Pekan Budaya ASEAN di Indonesia. Meskipun pendekatannya bervariasi, terdapat komitmen bersama untuk menjadikan budaya sebagai dasar integrasi dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Tulisan komprehensif tentang integrasi regional masih memerlukan pengkajian mendalam, terutama dalam dimensi

sosial-budaya, untuk memahami peran strategi budaya sebagai *soft power* dalam pembentukan identitas kawasan yang kohesif (ASEAN, 2016).

Meski begitu, riset akademik seringkali masih menempatkan sektor budaya sebagai pelengkap, bukan pokok kajian integrasi ASEAN (Acharya, 2021; Wang, 2024). Ini menciptakan *research gap*, yang dimana studi mengenai strategi budaya sebagai pembentuk identitas kolektif masih minim, padahal dalam konteks multikultural, narasi budaya punya potensi strategis besar untuk memperkuat solidaritas dan stabilitas kawasan (Conception, 2025; Humairoh, 2025).

Dalam konteks ini, strategi budaya menjadi krusial untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas lintas negara melalui narasi, simbol, dan praktik budaya yang inklusif. Namun, implementasi pendekatan kultural di ASEAN menghadapi tantangan, termasuk disparitas kapasitas institusional, perbedaan prioritas politik, dan keterbatasan sumber daya. Meskipun ASPCA telah diperkenalkan sejak 2016 sebagai kerangka strategis kerja sama budaya kawasan, implementasinya di tingkat regional dan nasional masih menunjukkan variasi, sehingga dampaknya terhadap penguatan identitas kolektif dan kohesi sosial belum sepenuhnya optimal (ASEAN, 2016, 2023). Tantangan ini perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana kebijakan budaya ASEAN dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan politik dan ekonomi yang beragam.

Dengan demikian, budaya tidak hanya diposisikan sebagai alat diplomasi lunak, tetapi juga sebagai jembatan strategis dalam proyek integrasi ASEAN yang dimana bercirikan keharmonisan sosial dan keberagaman nilai. Penulis bertujuan untuk menilai sejauh mana strategis budaya ASEAN mampu memperkuat dimensi integratif kawasan secara substansial, bukan hanya simbolik.

Melalui kajian terhadap strategi, implementasi dan dampak dari rencana strategis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika integrasi ASEAN yang lebih komprehensif. Dalam konteks pertarungan di pengaruh kawasan Indo-Pasifik dan tantangan global yang memerlukan respon kolektif, serta penguatan identitas ASEAN melalui pendekatan budaya dapat menjadi faktor yang krusial dalam menentukan arah dan relevansi organisasi regional ini dimasa depan (Das, 2024). Selain itu, penulis menunjukkan bahwa diplomasi budaya ASEAN menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi kawasan di tingkat internasional, khususnya melalui interaksi budaya yang melibatkan baik aktor negara maupun non-negara (R. I. Ma, 2015).

Tulisan ini mengisi celah literatur dengan menganalisis peran ASPCA sebagai instrumen integrasi sosial-budaya ASEAN. Fokus penulis adalah menganalisis ASPCA 2016-2025 sebagai instrumen memperkuat integrasi sosial-budaya dan identitas ASEAN secara kualitatif, melalui analisis mendalam terhadap strategi, implementasi dan dampaknya. Diharapkan hasilnya menambah kontribusi akademik dalam memahami peran budaya dalam regionalisme ASEAN dan memberikan arahan strategis memaksimalkan budaya sebagai jembatan antara kepentingan politik-ekonomi dalam tatanan global yang terus berkembang.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam tulisan ini bertumpu pada tiga pilar konseptual, yakni kerja sama budaya, teori identitas dalam hubungan internasional, serta *new regionalism* dengan *soft power* sebagai penguat. Pertama, konsep kerja sama budaya dipahami sebagai praktik kolaborasi lintas negara untuk memperkuat solidaritas melalui pertukaran seni, warisan budaya, dan nilai sosial (Acharya, n.d.) . Konsep ini relevan karena ASEAN

memanfaatkan strategi budaya guna membangun kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik identitas di kawasan (ASEAN, 2016).

Kedua, teori identitas dan *new regionalism* digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas kawasan ASEAN dikonstruksi melalui interaksi sosial-budaya. Identitas regional tidak bersifat statis, melainkan terbentuk dari norma, simbol, dan nilai bersama yang dikembangkan secara institusional maupun masyarakat sipil (Hall, 2011; Wendt, n.d.). Pendekatan serupa juga tampak dalam kasus Asia Timur, di mana Korea Selatan memanfaatkan K-pop dan budaya populer sebagai instrumen *soft power* untuk memperkuat citra internasional, sementara Jepang mengembangkan strategi *Cool Japan* untuk menanamkan daya tarik budaya di tingkat global. Fenomena ini menunjukkan bahwa *soft power* dengan basis budaya mampu membentuk persepsi kolektif. Pada saat yang sama pula, ia juga memperkuat identitas suatu kawasan di mata dunia (Jung, 2011; Otmazgin, 2025).

Dalam kajian hubungan internasional, identitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi budaya, sejarah, dan simbol, serta bersifat dinamis mengikuti proses representasi dan negosiasi budaya (Wendt, 1992; Wheatley, 2024). Di Asia Tenggara, identitas regional ASEAN berkembang melalui institusionalisasi norma seperti non-intervensi dan musyawarah, yang diperkuat oleh interaksi sosial-budaya lintas negara (Acharya, 2021).

Dengan membandingkan dinamika ini, dapat dipahami bahwa ASEAN memiliki potensi serupa dalam menggunakan budaya sebagai instrumen integrasi regional dan penguatan identitas bersama. Sejalan dengan itu, penulis lain menunjukkan bahwa identitas kawasan di Asia Tenggara senantiasa bersifat dinamis, terbentuk melalui interaksi budaya lintas negara yang dimana melibatkan masyarakat sipil dan aktor non-negara. Dalam konteks ASEAN, penguatan identitas

regional dilakukan melalui pemetaan budaya yang menempatkan keberagaman praktik budaya nasional ke dalam kerangka regional yang saling terhubung, seperti warisan budaya bersama, ekspresi seni lintas batas, dan narasi sejarah kawasan. Pemetaan ini tidak bertujuan menyeragamkan budaya negara anggota, melainkan membangun titik temu simbolik dan tematik yang memungkinkan masyarakat ASEAN mengenali keberagaman tersebut sebagai bagian dari identitas kolektif kawasan (Yeo, 2022).

Sedangkan *new regionalism* menekankan bahwa integrasi tidak hanya *top-down*, melainkan juga melibatkan aktor non-negara dan komunitas budaya (Hettne & Söderbaum, 2025). Kerangka ini sesuai dengan konteks ASEAN *Strategic Plan for Culture and Arts 2016-2025* yang menekankan penguatan kohesi sosial melalui budaya. Kajian lain menyoroti bahwa konstruksi identitas regional di Asia Tenggara cenderung bersifat dinamis dan juga sering dipengaruhi faktor budaya populer serta mobilitas lintas batas (Yeo, 2022).

New regionalism menegaskan bahwa pembentukan kawasan melibatkan aktor negara dan non-negara termasuk masyarakat sipil dan komunitas budaya yang berperan dalam pertukaran nilai dan praktik kultural (Söderbaum, 2003). Dengan begitu, ASPCA menjadi manifestasi nyata dalam pemanfaatan strategi budaya untuk memperkuat identitas kolektif, meningkatkan kohesi kawasan, dan mengakomodasi partisipasi aktor non-negara dalam integrasi regional.

Lalu ketiga, *soft power*, yang menjadi perspektif pendukung untuk memahami bagaimana budaya digunakan sebagai instrumen diplomasi non-koersif. Nye (2004) menyatakan bahwa daya tarik nilai, norma, dan budaya dapat menciptakan pengaruh yang lebih tahan lama dibanding paksaan. ASEAN lalu memanfaatkan pendekatan ini untuk menanamkan pola pikir kolektif (ASEAN *mindset*), memperkuat kohesi internal, sekaligus membangun citra positif kawasan di

tingkat global. Hal ini sejalan dengan konsep *competitive identity* yang dikemukakan Anholt (2007), bahwa identitas budaya dapat menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi dan reputasi kawasan. Dengan kerangka analisis ini, penulis dapat mengurai bagaimana strategi budaya ASEAN berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial-budaya dan pembentukan identitas regional. Budaya juga semakin diakui sebagai instrumen *soft power* ASEAN, khususnya dalam meningkatkan citra kawasan sebagai komunitas yang inklusif dan berdaya saing (Lee, 2023).

Metode

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran ASEAN *Strategic Plan for Culture and Arts* (ASPCA) 2016-2025 dalam mendorong integrasi sosial-budaya dan pembentukan identitas kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, interpretasi dan konteks di balik kebijakan serta implementasi program budaya ASEAN, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif (Creswell & Poth, 2017; Silverman, 2020). Data penulis diperoleh melalui penelusuran dari berbagai sumber informasi daring, seperti dokumen resmi ASEAN, publikasi akademik, laporan lembaga internasional, serta berita dari media daring yang kredibel. Seluruh sumber dipilih karena relevan dengan fokus penulis dan juga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi budaya ASEAN.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang dimana meliputi proses reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi konsistensi informasi, sementara *peer debriefing* dilakukan dengan akademisi di bidang hubungan internasional dan studi budaya untuk meningkatkan

kredibilitas hasil tulisan ini (Miles et al., 2013; Nowell et al., 2017).

Dalam tulisan ini, teori *new regionalism* dan *soft power* digunakan secara operasional untuk menganalisis ASPCA sebagai studi kasus kerja sama sosial-budaya regional. Perspektif *new regionalism* digunakan untuk mengkaji peran aktor regional, mekanisme kerja sama lintas negara, serta keterlibatan aktor non-negara dalam implementasi ASPCA. Sementara itu, konsep *soft power* digunakan untuk menelaah bagaimana budaya, seni, dan nilai-nilai kawasan diposisikan sebagai instrumen non-koersif dalam membangun citra, kohesi sosial, dan identitas regional ASEAN. Melalui pendekatan ini, tulisan ini berupaya menunjukkan keterkaitan antara kerangka kebijakan ASPCA dan dinamika pembentukan identitas kawasan.

Pembahasan

Dialog Lintas Budaya sebagai Instrumen Integrasi Regional

ASPCA 2016-2025 menempatkan pembentukan kesadaran identitas ASEAN sebagai prioritas strategis. Program seperti *ASEAN Youth Cultural Forum* dan *ASEAN Culture and Arts Exhibition* dirancang untuk memperkenalkan nilai, simbol, dan narasi bersama kepada generasi muda kawasan (ASEAN, 2016).

Tabel 1. Bentuk Dialog Lintas Budaya dalam ASPCA

Bentuk Dialog Budaya	Contoh Program dalam ASPCA	Aktor yang Terlibat	Kontribusi terhadap Integrasi Regional
Pertukaran seni dan budaya	Festival seni ASEAN dan pameran budaya regional	Pemerintah, seniman dan komunitas budaya	Membangun kesadaran lintas budaya dan memperkuat rasa kebersamaan kawasan

Dialog kebijakan budaya	Forum budaya ASEAN dan pertemuan menteri kebudayaan	Negara anggota, institusi ASEAN	Menyelaraskan visi dan norma budaya regional
Pendidikan dan literasi budaya	Program pendidikan seni dan warisan budaya	Institusi pendidikan, masyarakat sipil	Menanamkan mindset ASEAN sejak dini
Kolaborasi kreatif lintas negara	Produksi seni kolaboratif dan residensi seniman	Aktor non-negara, industri kreatif	Mendorong identitas regional melalui praktik budaya bersama

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan ASPCA dan literatur terkait.

Di Indonesia sendiri, implementasi ini terlihat melalui *ASEAN Youth Cultural Forum 2019* di Yogyakarta yang mempertemukan mahasiswa dari seluruh negara anggota untuk berkolaborasi dalam seni pertunjukan. Program seperti *ASEAN Youth Cultural Forum* di Indonesia tidak hanya menumbuhkan apresiasi lintas budaya, tetapi juga memperkuat jejaring antar universitas di kawasan, sehingga terbentuk ruang interaksi berkelanjutan di kalangan generasi muda. Contoh lainnya lagi, Indonesia juga aktif mengintegrasikan nilai-nilai ASEAN dalam kurikulum pendidikan menengah, khususnya pada mata pelajaran IPS dan kewarganegaraan. Langkah ini menunjukkan upaya untuk menanamkan *ASEAN mindset* sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal identitas nasional, tetapi juga menginternalisasi identitas regional (Yulianingsih et al., 2018). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan formal dapat berfungsi sebagai medium strategis dalam menanamkan identitas kawasan sejak dini, sehingga tidak berhenti pada level pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ASEAN.

Sedangkan di Brunei Darussalam, mereka menjalankan *ASEAN Cultural Week* dengan melibatkan para pelajar sekolah menengah untuk mengenal budaya tetangga. Di Brunei Darussalam, kegiatan *ASEAN Cultural Week* tidak hanya

melibatkan sekolah, tetapi juga komunitas seni lokal, yang menunjukkan bagaimana program ini memperluas basis partisipasi masyarakat, tidak terbatas pada kalangan elit budaya saja. Keterlibatan komunitas lokal di Brunei juga memperlihatkan bahwa pelestarian budaya kawasan dapat berjalan efektif bila ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, di Filipina secara rutin mengirim delegasi seni muda dalam *ASEAN Youth Camp*, mempromosikan tari tradisional di tingkat kawasan. Sementara itu, di Filipina, *ASEAN Youth Camp* terbukti efektif menjadi sarana *people-to-people contact*, karena melibatkan pemuda dari beragam latar etnis yang berinteraksi melalui seni pertunjukan. Dengan begitu, *ASEAN Youth Camp* tidak hanya menjadi ajang seremonial tahunan, melainkan wadah yang memperkuat jejaring pemuda lintas negara secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penanaman ASEAN *mindset* tidak hanya dilakukan melalui kebijakan formal, tetapi juga lewat interaksi sosial-budaya yang memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan. Secara teoretis, langkah ini sejalan dengan konsep *soft power* (Nye Jr., 2004), di mana identitas dibangun melalui daya tarik budaya, bukan paksaan politik (Acharya, 2021). *Soft power* menjadi krusial dalam konteks kawasan multikultural seperti Asia Tenggara, di mana pendekatan koersif sulit diterapkan karena keberagaman politik, agama, dan budaya. Dalam hal ini, strategi budaya dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kohesi regional dan memperkuat diplomasi kawasan secara non-konfrontatif.

Dalam gagasan "*competitive identity*" juga menyatakan bahwa kekuatan budaya dapat digunakan untuk membangun citra positif suatu negara atau kawasan (Dinnie, 2007). Citra kolektif yang dibentuk dari kekayaan budaya dan warisan bersama dapat menjadi aset strategis yang memperkuat posisi

ASEAN di mata dunia. ASPCA secara implisit menjadi alat *soft power* kolektif ASEAN yang tidak hanya mengedepankan diplomasi budaya, tetapi juga menekankan nilai-nilai bersama sebagai sumber daya yang strategis di kawasan.

ASPCA memprioritaskan fasilitasi dialog lintas budaya melalui kegiatan seperti *ASEAN Plus Cultural Exchange Program* dan *ASEAN Dialogue on Cultural Diversity* (Humairoh, 2025). Thailand menjadi tuan rumah *ASEAN Cultural Year 2019* yang memfasilitasi diskusi antara seniman ASEAN dan mitra seperti Jepang dan Korea Selatan. Selanjutnya, inisiatif *ASEAN Cultural Year 2019* di Thailand tersebut memperlihatkan bagaimana acara festival lintas negara bisa memperkuat diplomasi publik sekaligus mendukung pariwisata budaya di kawasan. Hal ini menunjukkan bagaimana dimensi budaya dapat sekaligus mendukung sektor pariwisata, yang pada gilirannya memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Malaysia juga menggelar *ASEAN-China Cultural Forum* untuk membahas perlindungan warisan budaya takbenda. Lalu Malaysia, melalui kegiatan *ASEAN-China Cultural Forum*, menunjukkan bagaimana program ASPCA terhubung dengan mitra eksternal ASEAN, sekaligus memperluas pengaruh budaya kawasan di tingkat internasional. Malaysia menekankan diplomasi budaya melalui pertukaran seni dan festival lintas negara, misalnya *ASEAN Cultural Week* yang rutin diselenggarakan di Kuala Lumpur. Program ini berfungsi sebagai ruang untuk berdialog antarbudaya, sekaligus memperkuat solidaritas sosial lintas etnis di kawasan (Ahmad, 2020). Inisiatif ini membuktikan bahwa diplomasi budaya tidak hanya berfungsi untuk mempererat hubungan antarnegara anggota, tetapi juga untuk menjembatani interaksi dengan mitra eksternal ASEAN.

Myanmar mengadakan *Mandalay ASEAN Cultural Dialogue* yang memfokuskan diskusi pada pelestarian bahasa daerah. Di Myanmar, *Mandalay ASEAN Cultural Dialogue*

berfungsi tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga forum refleksi tentang tantangan keberagaman etnis di kawasan, sehingga relevan dengan kebutuhan domestik negara tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dialog lintas budaya mencegah konflik identitas sekaligus mendorong kolaborasi kreatif, seperti festival seni gabungan.

Hal ini mendukung pandangan Wang (2024) bahwa integrasi budaya yang berkelanjutan memerlukan ruang komunikasi terbuka untuk menjembatani perbedaan sejarah dan politik. Studi lain menunjukkan bahwa program pertukaran budaya di ASEAN mampu memperkuat solidaritas generasi muda dan menumbuhkan kesadaran identitas kolektif di kalangan masyarakat lintas negara (Tan, 2021). Refleksi ini memperlihatkan bahwa ruang dialog kultural dapat menjadi sarana penting dalam mengurangi ketegangan sosial domestik sekaligus menguatkan solidaritas regional.

Identitas Kolektif dan Pembangunan Inklusif Asia Tenggara

Dalam konteks budaya yang bersifat lintas batas, seperti budaya Melayu yang berkembang di beberapa negara Asia Tenggara, ASPCA memposisikan warisan budaya sebagai identitas bersama kawasan, bukan sebagai kepemilikan eksklusif negara tertentu. Pendekatan ini memungkinkan tumpang tindih budaya dipahami sebagai kekayaan regional yang merefleksikan sejarah, mobilitas, dan interaksi sosial lintas batas, sehingga mendorong kerja sama pelestarian yang bersifat inklusif dan kolaboratif. Melalui kerangka ini, ASPCA berupaya mengurangi potensi ketegangan antarnegara dengan menekankan pengakuan bersama, dialog budaya, dan pengelolaan warisan budaya secara kolektif sebagai bagian dari pembangunan identitas ASEAN yang inklusif (ASEAN, 2016, 2023).

Tabel 2. Ilustrasi Pelestarian Budaya dan Pembangunan Inklusif di Negara-negara ASEAN

Negara Anggota	Bentuk Pelestarian Budaya	Fokus Inklusivitas	Kontribusi terhadap Identitas Kolektif ASEAN
Indonesia	Pelestarian warisan budaya takbenda dan seni tradisional	Pemberdayaan komunitas lokal dan partisipasi masyarakat	Memperkuat narasi keberagaman budaya sebagai kekayaan bersama ASEAN
Thailand	Pengembangan pariwisata budaya berbasis komunitas	Integrasi budaya lokal dalam pembangunan ekonomi inklusif	Membangun citra kawasan yang menghargai tradisi dan modernitas
Vietnam	Pelestarian situs sejarah dan pendidikan budaya	Akses publik terhadap warisan budaya dan edukasi sejarah	Menumbuhkan kesadaran sejarah regional Asia Tenggara
Filipina	Promosi budaya populer dan ekspresi kreatif	Inklusi generasi muda dan komunitas kreatif	Menghubungkan identitas lokal dengan dinamika budaya regional

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan literatur terkait dan dokumen kebijakan ASEAN

Inisiatif seperti *ASEAN Heritage Parks* dan *ASEAN Cultural Heritage Digital Archive* memfasilitasi pelestarian warisan budaya (ASEAN, 2023). Seperti Vietnam yang aktif dengan mempromosikan situs warisan dunia seperti *Citadel of the Ho Dynasty* sebagai bagian dari tur edukasi ASEAN. Vietnam kemudian aktif memanfaatkan warisan budaya takbenda, seperti *Quan ho* dan *Ca tru*, sebagai sarana memperkuat kesadaran identitas ASEAN. Upaya pelestarian yang dipromosikan melalui program UNESCO-ASEAN menjadi

bukti bahwa warisan budaya dapat berfungsi sebagai medium pembentukan identitas kolektif regional (Pham Thi Thanh Hai, 2019).

Dalam konteks pelestarian warisan budaya, Vietnam mempromosikan warisan takbenda seperti *Quan ho dan Ca tru* yang memperlihatkan bagaimana ASPCA dapat berjalan seiring dengan program UNESCO, sehingga menambah legitimasi internasional atas identitas kawasan. Keterhubungan dengan program UNESCO juga memperluas legitimasi internasional ASEAN, sehingga kawasan tidak hanya dilihat sebagai entitas politik, tetapi juga pusat kebudayaan global.

Laos mengintegrasikan *Luang Prabang Heritage Walk* dalam promosi kawasan warisan ASEAN. Di sisi lain, program *Luang Prabang Heritage Walk* di Laos memperlihatkan komitmen sebagai negara kecil sekalipun untuk menempatkan budaya sebagai instrumen diplomasi, sekaligus mendukung sektor ekonomi lokal yang berbasis pariwisata. Dengan demikian, program ini juga menunjukkan bahwa negara kecil seperti Laos sekalipun memiliki kontribusi yang penting dalam membentuk narasi identitas bersama.

Timor-Leste, sebagai anggota terbaru, mulai mendigitalkan musik tradisional *tebe-tebe* untuk dimasukkan dalam *ASEAN Cultural Heritage Digital Archive*. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran warisan budaya tidak hanya menguatkan identitas kolektif ASEAN, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya (Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Sebagai negara kandidat, Timor-Leste juga berkontribusi melalui digitalisasi musik tradisional *tebe-tebe* yang menjadi contoh bagaimana sebuah teknologi digunakan untuk pelestarian budaya, serta menjadi bukti kesiapan negara ini dalam berkontribusi pada integrasi budaya ASEAN. Hal ini memberi pesan bahwa meskipun masih berstatus kandidat anggota, Timor-Leste memiliki kapasitas

dan komitmen untuk berpartisipasi dengan aktif dalam integrasi budaya kawasan.

ASPCA memanfaatkan budaya sebagai sebuah instrumen pembangunan dengan mengintegrasikan ekonomi kreatif, pemberdayaan komunitas, dan inklusi sosial (ASEAN, 2016). Kamboja mengembangkan *Silk Island Community Project* yang dimana mereka melatih para perempuan lokal untuk memproduksi kerajinan tenun untuk pasar ASEAN. Di Kamboja, proyek *Silk Island* ini memperlihatkan integrasi antara ekonomi kreatif dan diplomasi budaya, karena melibatkan komunitas lokal dalam produksi tekstil yang kemudian dipromosikan di level regional. Proyek ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif dapat diposisikan sebagai bagian integral dari pembanguna berkelanjutan berbasis budaya.

Singapura meluncurkan *ASEAN Fashion Designers Showcase* untuk menghubungkan desainer muda dari seluruh ASEAN dengan pasar global. Melalui *ASEAN Fashion Designers Showcase*, Singapura memperlihatkan bagaimana budaya kontemporer seperti mode dapat diposisikan sebagai bagian dari identitas ASEAN yang modern dan kompetitif secara global. Inisiatif ini juga memperlihatkan sisi modern dari ASEAN, dimana ekspresi budaya kontemporer dapat berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi. Brunei Darussalam mengadakan pelatihan kerajinan perak tradisional untuk mengembangkan kewirausahaan lokal. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini memodifikasi teori integrasi regional klasik yang cenderung fokus pada aspek politik-ekonomi, dengan menambahkan dimensi budaya sebagai pilar ketiga yang setara (Acharya, 2021).

Peran Aktor Non-Negara dalam Implementasi ASPCA

Selain pemerintah dan lembaga resmi ASEAN, aktor non-negara memainkan peran krusial dalam implementasi ASPCA 2016–2025. Lembaga swadaya masyarakat, komunitas seni,

universitas, dan pelaku industri kreatif turut serta dalam mendorong terciptanya pertukaran budaya lintas batas yang inklusif. Kegiatan seperti festival seni independen, residensi seniman, dan kolaborasi riset budaya lintas universitas telah memperluas jangkauan diplomasi budaya ASEAN di luar jalur formal (Conception, 2025). Hasil ini memperkuat pandangan yang mengatakan bahwa strategi penguatan identitas kawasan tidak hanya melalui jalur diplomasi formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendidikan sosial yang menginternalisasi nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman (Zainuddin, 2023). Studi lain juga menemukan bahwa inisiatif pertukaran budaya ASEAN efektif dalam memperkuat solidaritas terhadap generasi muda serta meningkatkan kesadaran identitas kolektif di kawasan (Tan, 2021).

Pendekatan ini sejalan dengan *new regionalism* yang menempatkan interaksi antara aktor negara dan non-negara sebagai fondasi dalam pembentukan identitas kawasan (Söderbaum, 2003). Keterlibatan luas masyarakat sipil memastikan bahwa inisiatif budaya tidak hanya menjadi proyek elitis, tetapi juga responsif terhadap aspirasi akar rumput, sehingga memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki di tingkat komunitas.

New regionalism menyoroti pentingnya konektivitas sosial dan kultural sebagai fondasi integrasi. Artinya, pembentukan kawasan tidak hanya melalui mekanisme institusional, tetapi juga lewat pertukaran ide, nilai, dan praktik budaya antar masyarakat di dalam kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan integrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis dalam menilai sejauh mana strategi budaya ASEAN bersifat inklusif, serta seberapa besar peran non-state actors dalam memperkuat identitas kawasan melalui mekanisme budaya.

Meski menunjukkan adanya kemajuan, pelaksanaan ASPCA menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesenjangan kapasitas antarnegara anggota, keterbatasan pendanaan, hingga rendahnya keterlibatan generasi muda di beberapa negara. Perbedaan prioritas nasional juga kerap memengaruhi keberlanjutan program bersama (Ullah & Ming Yit Ho, 2021). Namun, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya arus pariwisata budaya menawarkan peluang signifikan untuk memperluas dampak ASPCA.

Pemanfaatan platform digital, seperti arsip budaya daring dan pertunjukan seni virtual, memungkinkan jangkauan audiens lintas batas secara cepat dan hemat biaya (X. Ma, 2024). Kolaborasi dengan mitra eksternal seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa yang juga dapat memperkaya kapasitas teknis dan sumber daya, sekaligus memperkuat posisi ASEAN dalam diplomasi budaya global. Dengan memanfaatkan peluang ini, ASPCA berpotensi tidak hanya memperkuat identitas regional, tetapi juga meningkatkan daya saing budaya ASEAN di panggung internasional.

Dengan aspek-aspek tersebut seperti penanaman *mindset* ASEAN, dialog lintas budaya, kesadaran warisan budaya, pemanfaatan budaya untuk pembangunan, peran aktor non-negara serta tantangan dan peluang terhubung secara sinergis dengan keterlibatan semua 11 negara anggota: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor-Leste. Implementasi beragam di setiap negara memperlihatkan adaptasi lokal terhadap kerangka ASPCA, sekaligus menguatkan identitas kolektif kawasan. Temuan ini memperkuat relevansi budaya sebagai soft power ASEAN (Nye Jr., 2004) dan membuka ruang modifikasi teori integrasi regional berbasis identitas.

ASPCA tidak hanya memayungi kolaborasi lintas negara dalam bidang budaya, tetapi juga mendorong partisipasi

masyarakat sipil, komunitas akar rumput, dan pelaku budaya dalam membentuk identitas kawasan yang kohesif. Melalui program budaya lintas negara seperti festival seni, pertukaran pelajar, dan proyek lintas komunitas, ASEAN memfasilitasi terbentuknya ruang interaksi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi kawasan.

Strategi budaya ini juga mencerminkan penggunaan *soft power* sebagai instrumen diplomasi regional, di mana budaya dijadikan alat untuk memperkuat keterikatan sosial dan legitimasi kolektif, baik di tingkat internal ASEAN maupun dalam relasi dengan aktor global. Kerja sama budaya ASEAN bukan hanya bertujuan melestarikan warisan budaya, tetapi juga membangun narasi bersama tentang siapa ASEAN dan nilai-nilai apa yang menjadi identitas kawasan.

Kesimpulan

Penulis menemukan bahwa ASEAN *Strategic Plan for Culture and Arts* (ASPCA) 2016-2025 memiliki peran yang signifikan dalam mendorong integrasi sosial-budaya dan pembentukan identitas kawasan Asia Tenggara. Melalui empat fokus strategis seperti penanaman *mindset* ASEAN, fasilitasi dialog lintas budaya, peningkatan kesadaran warisan budaya, dan pemanfaatan budaya untuk pembangunan inklusif, ASPCA berhasil menciptakan ruang kolaborasi yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi program budaya di tiap negara anggota, meski bervariasi sesuai konteks lokal, tetap mengarah pada tujuan bersama membangun solidaritas kawasan. Interaksi budaya yang dihasilkan tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap ASEAN, tetapi juga memposisikan budaya sebagai pilar penting dalam regionalisme, setara dengan aspek politik dan ekonomi.

Dengan capaian ini, ASPCA membuktikan bahwa strategi berbasis budaya mampu menjadi katalisator kohesi

sosial dan memperkuat legitimasi ASEAN di kancah global. Ke depan, kesinambungan program serupa, disertai adaptasi terhadap dinamika sosial dan politik, akan menjadi kunci mempertahankan relevansi identitas kolektif ASEAN di tengah tantangan globalisasi. Dengan demikian, strategi budaya ASEAN tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga menjadi pendorong substantif bagi kohesi sosial, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian terbaru tentang regionalisme kultural di Asia Tenggara (Hamanaka, 2022).

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (n.d.). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. ResearchGate. Retrieved September 19, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/324083557_Constructing_Global_Order_Agency_and_Change_in_World_Politics
- Acharya, A. (2021). *ASEAN and Regional Order: Revisiting Security Community in Southeast Asia*. Routledge & CRC Press. <https://www.routledge.com/ASEAN-and-Regional-Order-Revisiting-Security-Community-in-Southeast-Asia/Acharya/p/book/9780367641528>
- Ahmad, N. (2020). *Cultural diplomacy in Malaysia: Promoting ASEAN solidarity through the arts*. *Asian Journal of Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1177/2057891119897398>
- ASEAN. (2009). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2016). *ASEAN strategic plan for culture and arts 2016-2025*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2023). *ASEAN Identity: Now and Beyond*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp->

content/uploads/2023/10/ASEAN-Identity_now-and-beyond.pdf

- Banks, J. A. (2014). *An introduction to multicultural education* (5. ed). Pearson Education.
- Chandra, D. (2020). *Soft power and cultural cooperation in Southeast Asia. Asian Journal of Comparative Politics*.
<https://doi.org/10.1177/2057891119897411>
- Concepcion, G. P. (2022). A Single Identity while Facing Diversity? Exploring ASEAN Integration through Culture. *SUVANNABHUMI*, 14(2), 269–303.
<https://doi.org/10.22801/SVN.2022.14.2.269>
- Conception, G. (2025). Constructing ASEAN Identity Through Shared Cultural Heritage and Socio-Cultural Solidarity: A Proposal. *SUVANNABHUMI*, 17(1), 7–31.
<https://doi.org/10.22801/svn.2025.17.1.7>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Das, S. (2024). Ethno-Cultural Diversity: A Challenging Parameter for Asean Regional Integration. *Interdisciplinary International Journal of Advances in Social Sciences, Arts and Humanities (IIJASSAH)*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.62674/ijassah.2024.v1i1.004>
- Dinnie, K. (2007). Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions. *Journal of Brand Management*, 14(6), 474–475.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550086>
- Hall, S. (2011). Introduction: Who Needs 'Identity'? In S. Hall & P. Du Gay, *Questions of Cultural Identity* (pp. 1–17). SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781446221907.n1>
- Hamanaka, S. (2022). *ASEAN community building and the challenge of identity. Journal of Contemporary Asia*.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2066321>

- Hettne, B., & Söderbaum, F. (2025). (PDF) Theorising the Rise of Regionness. *ResearchGate*.
<https://doi.org/10.1080/713687778>
- Humairoh, S. A. (2025, May 22). Balancing National Pride and Regional Identity: ASEAN's Cultural Dilemma. *Modern Diplomacy*.
<https://moderndiplomacy.eu/2025/05/22/balancing-national-pride-and-regional-identity-aseans-cultural-dilemma/>
- Jung, S. (2011). K-pop, Indonesian fandom, and social media. *Transformative Works and Cultures*, 8.
<https://doi.org/10.3983/twc.2011.0289>
- Lee, J. (2023). Cultural soft power strategies in ASEAN: Opportunities and constraints. *Journal of Asian Public Policy*.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2022.2073564>
- Ma, R. I. (2015). Cultural Diplomacy in ASEAN: Collaborative Efforts. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5(4), 394–397. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2015.V5.487>
- Ma, X. (2024). Cultural Diplomacy and China's Image in Southeast Asia: Managing Bilateral Relations through Soft Power. *Journal of Political Science Research*, 5(2).
<https://doi.org/10.23977/polsr.2024.050204>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nadalutti, E., & Rüland, J. (2024). Cross-border regionalism in the EU and ASEAN: Another dimension of the “varieties of regionalism.” *Journal of European Integration*, 46(8), 1193–1214.
<https://doi.org/10.1080/07036337.2024.2329636>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847.
<https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Nye Jr., J. S. (2004). Soft Power the Means to Success in World Politics—Joseph S. Nye Jr. *Academia.Edu*. Anna Paula. https://www.academia.edu/88825015/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World
- Otmazgin, N. (2025). (PDF) Geopolitics and Soft Power: Japan's Cultural Policy and Cultural Diplomacy in Asia. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/259779790_Geopolitics_and_Soft_Power_Japan's_Cultural_Policy_and_Cultural_Diplomacy_in_Asia
- Pham Thi Thanh Hai. (2019). *Intangible cultural heritage and ASEAN identity: A case study of Vietnam*. *International Journal of Cultural Policy*. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1512243>
- Silverman, D. (2020). *Qualitative Research*. SAGE.
- Söderbaum, F. (2003). Introduction: Theories of New Regionalism. In *Introduction: Theories of New Regionalism*. *researchgate.net*. https://doi.org/10.1057/9781403938794_1
- Sundram, P. (2025). Network governance in ASEAN: Fostering regional cooperation and integration. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1434595>
- Tan, S. (2021). *The politics of cultural regionalism in Southeast Asia*. *Asian Studies Review*. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1825243>
- Ullah, A. K. M. A., & Ming Yit Ho, H. (2021). Globalisation and Cultures in Southeast Asia: Demise, Fragmentation, Transformation. *Global Society*, 35(2), 191–206. <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1747992>
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/DRHC3544>
- Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2019). Intergroup Toleration and Its Implications for Culturally

- Diverse Societies. *Social Issues and Policy Review*, 13(1), 5–35. <https://doi.org/10.1111/sipr.12051>
- Wang, C. (2024). The Challenge of Cultural Diversity in Regional Integration: A Comparative Analysis of the EU and ASEAN. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 2(2), 263–268. <https://doi.org/10.62051/ijsspa.v2n2.37>
- Wendt, A. (n.d.). *Social Theory of International Politics*.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. The MIT Press.
- Wheatley, M. (2024). Media Representation and Cultural Identity. *Premier Journal of Social Science*, 2024. <https://doi.org/10.70389/PJSS.100004>
- Wunderlich, J. (2012). The EU an Actor *Sui Generis*? A Comparison of EU and ASEAN Actorness*. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 50(4), 653–669. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02237.x>
- Yeo, L. H. (2022). *Revisiting ASEAN regionalism: Culture, identity and integration*. *The Pacific Review*. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1875535>
- Yulianingsih, W., Supriyono, S., Rasyad, A., & Dayati, U. (2018). The Involvement of Informal Sector Workers In Society Learning Activities at Kampung Inggris Pare Kediri. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3), 132–144.
- Zainuddin, Z. (2023). The Urgency of Social Studies Education in a Multicultural Society. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v5i1.8223>

